



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 061/Kep.2539-Bagor/2023

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 061/Kep.828-Bagor/2023 tentang Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap implementasi Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi terhadap ketercapaian kegiatan utama dan indikatornya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, disampaikan kepada Tim Penilai Nasional.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LURMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG
RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2023

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
RB Tematik Kemiskinan															
Target Tahun 2023 : 4,23															
Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)															
Indikator : Menurunnya angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)															
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskina n	Persen	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Melaksanakan pemberian bantuan sosial kesejahteraan	KK/ TRIWULAN	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	90.0 00	90.00 0	90.00 0	90.00 0	90.00 0	Dinas Sosial	Dinas Sosial
						Menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan	TON	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Kemiskinan	0	30	30	15,88	75,88	DKPP	DKPP
						Memfasilitasi pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin rentan rawan pangan	KK/ Semester	Jumlah Masyarakat Miskin di Daerah Rentan Rawan Pangan Terfasilitasi	0	400	0	400	400	DKPP	DKPP
						Melaksanakan penerimaan pengajuan dan pendaftaran	Persen	Cakupan warga miskin yang mengajukan dan didaftarkan	100	100	100	100	100	Dinkes	Dinkes

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Jaminan kesehatan nasional warga miskin		Jaminan kesehatan nasionalnya							
						Melakukan pendataan dan pemberian bantuan alat bantu dan alat bantu peraga bagi penyandang disabilitas	Orang	Warga miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan alat bantu	0	0	125	0	125	Dinsos	Dinsos
						Melaksanakan Pelayanan Pemakaman Bebas Biaya Bagi Warga Miskin	Persen	Persentase Warga miskin mendapatkan bantuan pelayanan pemakaman.	100	100	100	100	100	Disciptabintar	Disciptabintar
						Melaksanakan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Sekolah Dasar	Peserta Didik	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	0	0	8,076	0	8,076	Disdik	Disdik
						Menyediakan Bantuan Perlengkapan Pendidikan untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Sekolah Dasar	Unit	Jumlah perlengkapan peserta didik Sekolah Dasar yang tersedia	0	0	44.616	0	44.616	Disdik	Disdik
						Melaksanakan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik Rawan	Peserta Didik	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya	0	0	11.662	0	11.662	Disdik	Disdik

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		personal peserta didik							
						Menyediakan Bantuan Perlengkapan Pendidikan untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan SMP	Unit	Jumlah perlengkapan peserta didik sekolah menengah pertama yang tersedia	0	0	27.82 0	0	27.82 0	Disdik	Disdik
						Melaksanakan Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Kesetaraan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Peserta Didik	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti proses belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	45	45	-	-	327	Disdik	Disdik
			Rendahnya pendapatan masyarakat miskin	Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	Melaksanakan penempatan kerja temporari kepada pencari kerja	Orang	Jumlah Pencari Kerja Pada Tempat Kerja Temporari	250	250	250	2250	1000	Disnaker	Disnaker
						Melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi bagi calon wirausaha	Orang	Jumlah calon wirausaha Yang Mengikuti Pelatihan Dan Uji Kompetensi	540	460	620	360	1940	Disnaker	Disnaker
						Melaksanakan pemberian bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	KK	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	25	25	100	Dinsos	Dinsos

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Melaksanakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan Dan Uji Kompetensi	0	60	80	20	160	Disnaker	Disnaker
						Melaksanakan Pelatihan dan Uji Kewirausahaan bagi calon wirausaha	Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan Dan Uji Kompetensi	400	1200	1200	840	3640	Disnaker	Disnaker
						Melaksanakan Pemagangan Calon Tenaga Kerja	Orang	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Magang	0	100	60	40	200	Disnaker	Disnaker
						Melaksanakan Pembinaan Koperasi yang Memfasilitasi Bantuan Usaha Bagi Warga Miskin	Koperasi	Jumlah Koperasi yang Memfasilitasi Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro Warga Miskin	0	0	1	0	1	Diskop UKM	Diskop UKM
						Melaksanakan Pembinaan pelaku usaha mikro warga miskin yang memerlukan Pembinaan dan Fasilitasi Usaha	Orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Warga Miskin yang Memerlukan Pembinaan dan Fasilitasi Usaha	0	0	4	0	4	Diskop UKM	Diskop UKM
						Melaksanakan pemberdayaan bidang ekonomi kepada Warga Miskin Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	PEKKA	Jumlah Warga Miskin Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang diberdayakan dibidang ekonomi	100	100	100	100	100	DP3A	DP3A

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						PUSPAGA (layanan konseling keluarga dan edukasi)	PEKKA	Perempuan Kepala Keluarga miskin yang dilayani konseling dan edukasi	-	-	10	100	110	DP3A	DP3A
						UPTD PPA (layanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak)	%	Korban kekerasan terhadap Perempuan kepala keluarga miskin dan anak yang mendapat layanan	-	-	100	100	100	DP3A	DP3A
			Banyaknya sebaran Kantong Kemiskinan	Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan	Kantong Kemiskinan Aspek Pendidikan	Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD	Ruang	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	-	-	25	-	25	Disdik	Disdik
					Kantong Kemiskinan Aspek Kesehatan	Bertambahnya Ruang Kelas Baru SMP	Ruang	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	-	-	56	-	56	Disdik	Disdik
					Kantong Kemiskinan Akses Layanan Air Minum Layak	Terbangunnya sarana, parasarana dan utilitas PAUD	Unit	Jumlah sarana, parasarana dan utilitas PAUD yang terbangun	-	-	1	-	1	Disdik	Disdik
						Terbangunnya sarana, parasarana dan utilitas Sekolah Nonformal/ kesetaraan	Unit	Jumlah sarana, parasarana dan utilitas Sekolah Nonformal/ kesetaraan yang terbangun	-	-	1	-	1	Disdik	Disdik
						Terbangunnya Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas yang dibangun	-	-	-	4	4	Dinkes	Dinkes
						Melaksanakan pengelolaan limbah domestik	KK	Jumlah kepala keluarga warga miskin yang terlayani	-	-	5	10	15	DKPP	DKPP

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
								pengelolaan air limbah domestik							
						Melaksanakan penyediaan air minum layak	KK	Jumlah kepala keluarga warga miskin yang terlayani air minum layak	-	-	20	40	60	DPKP	DPKP
						Melaksanakan perbaikan rumah (milik sendiri) warga miskin yang tidak layak huni	Unit	Jumlah rumah (milik sendiri) warga miskin yang diperbaiki	-	-	-	46	46	DPKP	DPKP
RB Tematik Investasi Target Tahun 2023 : 7,25 Triliun Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi Indikator : Nilai Realisasi Investasi															
1	Meningkatnya pengetahuan calon investor terhadap potensi penanaman modal	Peningkatan Penerima Informasi Potensi dan peluang Investasi	Belum optimalnya promosi penanaman modal	Meningkatnya Cakupan Promosi Investasi	Persentase Potensi Bidang Usaha Penanaman Modal yang Terpromosikan	Meningkatnya kegiatan promosi penanaman modal	Kegiatan	Kegiatan promosi penanaman modal yang terlaksana	1	2	3	2	8	DPMPTSP	DKUKM, Disdagin, Disbudpar, asosiasi dan pelaku usaha, Bag. Kerjasama
						Meningkatnya fasilitasi Pelaku Usaha mikro dalam kegiatan temu bisnis	Kegiatan	Jumlah kegiatan Temu Bisnis	1	2	2	1	6	DiskopUKM	DiskopUKM
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha mengenai ketentuan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang patuh dari kegiatan pembinaan	Belum optimalnya Kepatuhan pelaku usaha mengenai ketentuan penanaman modal	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal	Pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal dari kegiatan pembinaan	Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap ketentuan penanaman modal	Dokumen	Laporan Kegiatan pembinaan ketentuan penanaman modal	1	2	2	1	6	DPMPTSP	DPMPTSP, Disdagin, Dinkes, Disbudpar, DKPP, Pelaku Usaha
						Meningkatnya kegiatan pengawasan terhadap ketentuan	Dokumen	Berita acara hasil Pengawasan	-	4	-	12	16	DPMPTSP	Dinkes, Disdagin, Disbudpar,

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						penanaman modal		penanaman modal							DKPP, Pelaku usaha
						Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap standar usaha jasa pariwisata	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan industri pariwisata yang sesuai dengan standar usaha jasa pariwisata sesuai NSPK	4	4	3	3	14	Disbudpar	Disbudpar, Asosiasi Usaha Pariwisata
						Meningkatnya tata cara pelaporan kegiatan pendirian usaha	Dokumen	Monitoring/ survey kegiatan usaha	-	-	1	1	2	Disdagin	Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan
						Meningkatnya Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut	Kegiatan	Cakupan bina kelompok tani	-	-	-	15,90 %	15,90 %	DKPP, Pelaku Usaha Pertanian	DKPP
						Tersedianya rancangan kebijakan kemudahan penanaman modal	Dokumen	Rancangan kebijakan kemudahan penanaman modal	-	-	-	1	1	DPMPTSP	Bapenda, DKUKM, Disdagin, Disbudpar, Disnaker
3	Meningkatnya kondusifitas iklim penanaman modal	Pemenuhan ketentuan mengenai pengembangan iklim penanaman modal	Belum optimalnya kebijakan terkait penanaman modal	Meningkatnya ketersediaan terkait kebijakan penanaman modal	Rancangan kebijakan penanaman modal yang memenuhi ketentuan	Tersedianya rancangan kebijakan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen	Rancangan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah	-	-	1	-	1	Bapenda	
			Belum optimalnya potensi investasi yang terpetakan	Meningkatnya cakupan peta potensi investasi	Cakupan peta potensi investasi	Teridentifikasinya potensi dan peluang penanaman modal	Database	Data/informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal yang dimutakhirkan	-	-	1	1	2	DPMPTSP	Disdagin (Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan), PD, kecamatan,

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
															BUMD dan pelaku usaha
						Meningkatnya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, pemagangan dan wirausaha baru	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan yang berbasis kompetensi, pemagangan, Wira Usaha Baru.	940	1820	1960	1260	5980	Disnaker	
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha	Tercapainya target nilai IKM sesuai dengan target RPJMD	Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan berusaha	Optimalisasi Sistem Informasi Perijinan dan Penanaman Modal	Pemanfaatan Sistem Informasi	Meningkatnya hasil Penilaian Kinerja Mandiri PTSP (Kelembagaan, SDM, Sarana dan Prasarana, Implementasi OSS, serta Keluaran)	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	1	-	-	1	DPMPTSP	
				Optimalisasi kinerja PTSP dan PPB	Nilai kinerja PTSP dan PPB	Meningkatnya hasil Penilaian Kinerja Mandiri PPB (Penerapan perizinan berusaha, Penyederhanaan persyaratan dasar, dan	Dokumen	Verifikasi dan validasi penilaian kinerja mandiri PPB	-	1	-	-	1	DPMPTSP	Diciptabintar, DLHK, Disdagin, DKUKM, Disnaker, Bag. Perekonomian

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						peningkatan iklim investasi)									
RB Tematik Inflasi Target Tahun 2023 : 4,5% Sasaran : Terkendalinya Tingkat Inflasi Daerah Indikator : Tingkat Inflasi															
1	Terwujudnya Keterjangkauan Harga	Presentase penurunan komoditas harga pangan diatas HET	Belum terjaganya stabilitas Harga Pangan "Belum stabilnya harga pangan andil inflasi "	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan "Meningkatnya stabilisasi harga pangan andil inflasi"		Terwujudnya Stabilitas kebutuhan pokok melalui koordinasi Pemerintah Pusat, daerah dan Satgas Pangan	Harga	Harga Eceran Tertinggi 15%	15%	15%	15%	15%	15%	Disdagin	Disdagin, DKPP, Bag. Ekonom
						Terlaksananya Monitoring dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok	Kali Koordinasi	Pasar Tradisional dan Modern	8	8	8	8	32	Disdagin	Disdagin, DKPP, Bag. Ekonom
						Tersosialisasi Keamanan Pangan melalui Food Security pada setiap hari kerja	Laporan	Laporan kegiatan sosialisasi dan laporan hasil pemeriksaan pangan segar	14	14	14	14	56	DKPP	DKPP
						Terselenggaranya Optimalisasi kegiatan KPSH Beras dan CPPD	Tonase	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras dan CPPD	20,75	20,75	20,75	20,75	83	DKPP	DKPP
						Terselenggaranya Bazar Murah dan Operasi Pasar Kepokmas	Kali Koordinasi	Bazar Murah dan Operasi Pasar	1	-	1	-	2	Disdagin	Disdagin
						Terwujudnya Kerjasama Antar Daerah Komoditas Pangan	Naskah Kerjasama	Terfasilitasinya Naskah Kerjasama	-	11	11	11	11	Bagian Kerjasama	Bagian Kerjasama
			Belum terkelolanya	Terkelolanya Data		Terlaksananya Monitoring Pendataan	Kegiatan	Monitoring dan Pengawasan Harga LPG 3 kg di ditingkat	-	1	-	1	2	Disdagin	Disdagin

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
			data permintaan	Permintaan Dengan Baik		Distribusi LPG 3 Kg		Agen (64) dan Pangkalan (1.260)							
						Terselenggaranya Pembinaan pelaku usaha distribusi Bapokting	Kegiatan	Pembinaan Pelaku Usaha Bapokting	1	-	-	1	2	Disdagin	Disdagin
						Terlaksananya Pembinaan Substitusi Konsumsi Pangan Pokok	Kegiatan	Sosialisasi dan pembinaan konsumen dan produsen pangan Non Beras, Terigu Bergizi Seimbang dan Aman	-	1	-	-	1	DKPP	DKPP
						Terwujudnya penetapan pengaturan biaya pendidikan dasar	Kegiatan	Bantuan RMP dan BOS	-	1	-	-	1	Disdik	Disdik
						Terselenggaranya Optimalisasi Platform digital	Kegiatan	Pelatihan Digital Marketing melalui pemanfaatan pemanfaatan Market Place dan Media Sosial bagi Pelaku UMKM	-	1	-	-	1	DiskopUKM	DiskopUKM, Disdagin, Disbudpar, DKPP
						Terlaksananya Monitoring pelaku usaha telur ayam ras, daging ayam ras dan daging sapi	Kegiatan	Pelaku usaha telur ayam ras, daging ayam ras dan daging sapi	64	64	64	64	64	DKPP	DKPP
						Terselenggaranya Pendampingan UMKM/Wirausaha Baru	Kegiatan	Bimbingan, Konsultasi dan Advokasi Kewirausahaan	-	600	36	1240	1876	DiskopUKM	DiskopUKM, DKPP, Disnaker

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
2	Terwujudnya Ketersediaan Pasokan	Neraca Pangan Strategis	Terbatasnya lahan pertanian di Kota Bandung	Meningkatnya Produksi Cadangan Pangan Pemerintah				bagi pelaku UMKM							
						Terwujudnya Penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	Kegiatan	Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial PKH dan BPNT	1	1	1	1	4	Dinsos	Dinsos
						Terlaksananya Integrated Farming Buruan SAE	Kelompok	Penambahan 80 kelompok Buruan SAE dan Pengembangan Komoditas Holtikultura	-	50	-	30	80	DKPP	DKPP
						Terselenggaranya Peningkatan Produksi perikanan budidaya serta tebar benih melalui pelatihan	Kali Pelatihan	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	-	3	4	3	10	DKPP	DKPP
			Kurang koordinasi antar Kelembagaan dan Perangkat Daerah	Menguatnya Peran Kelembagaan Pengendalian Inflasi		Terlaksananya Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Tonase	ATM Beras	20,75	20,75	20,75	20,75	83	DKPP	DKPP
						Terwujudnya Peningkatan Persentase Omzet Usaha Mikro	Laporan (%)	Pemasaran gallery Salapak melalui Ramadhan Fest, Week End Market, Big Sale Event	1	1	1	1	4	Diskop UKM	DiskopUKM, Dekranasda dan Unsur BUMN
						Terjalinnnya Kerjasama Antar Daerah untuk komoditas pangan strategis	Naskah Kerjasama	Terfasilitasinya Naskah Kerjasama	11	11	11	11	11	Bag. Kerjasama	Kota Bandung dan Kab/ Kota
3	Terciptanya Distribusi Yang Lancar	Terukurnya waktu pengirim	Masih terhambatnya waktu	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan		Terwujudnya Penguatan implementasi	Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan promosi dan pemasaran produk usaha	1	2	1	1	5	DiskoUKM	DiskopUKM, Disbudpar

[illegible]

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
Terciptanya Komunikasi yang Efektif	koordinasi yang ditindaklanjuti	koordinasi antara TPIN, TPID Provinsi, TPID Kab/Kota	Meningkatnya Perbaikan Kualitas Data			Tersedianya sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis									
						Terwujudnya Peran aktif Kepala Daerah dalam menyampaikan informasi kondisi pangan dan isu strategis lainnya terkait pengendalian inflasi									
						Terlaksananya Penguatan Pelaporan kegiatan Pengendalian Inflasi kepada Provinsi dan Pusat	Laporan	Penyusunan Laporan Kegiatan TPID Triwulanan dan Penyusunan Peta Jalan TPID	1	1	1	1	4	Bagian Ekonomi	Bag. Ekonomi, TPID Kota Bandung
						Terjalinnnya Komunikasi Harmonis dengan Instansi/Lembaga	Kegiatan	Sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Instansi terkait terkait Perkembangan Inflasi Daerah	5	5	5	5	20	Tim TPID Kota Bandung	TPID Kota Bandung, Provinsi, Pusat
						Terselenggaranya Rapat Koordinasi	Kegiatan	Menyelenggarakan Rakor TPID, Capacity Building, FGD dan HLM	-	1	1	1	3	Bagian Ekonomi	Bag. Ekonomi, Tim TPID Kota Bandung
						Terselenggaranya Siaran Pers, Talk Show, Program Bandung Menjawab dan program lainnya dalam rangka membentuk persepsi positif Masyarakat	Sosialisasi	Pemberian Informasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Media Sosial dan Media Massa, Peningkatan Kerjasama Forkopimda dan	1	1	1	1	4	Diskominfo	Diskominfo, TPID Kota Bandung, Baznas, Bag. Kesra

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
								Forum Ulama dalam penyebaran informasi Inflasi Daerah							
RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan															
Target Tahun 2023 : 17,00															
Sasaran : Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital dalam Penanganan Stunting															
Indikator : Prevalensi Stunting (Persentase Stunting)															
1	Terwujudnya perbaikan Asupan gizi	Angka Kecukupan Protein (Pengampu DKPP)	Ketahanan Pangan belum optimal dan belum merata	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor pola pangan harapan (Pengampu DKPP)	Pelayanan tatalaksana gizi buruk bagi balita gizi buruk (Pengampu Dinkes)	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan tatalaksana gizi buruk	80	80	80	80	80	Dinas Kesehat an	Dinas Kesehatan
		Angka Kecukupan energi (Pengampu DKPP)				Pemberian PMT bagi Balita gizi kurang (Pengampu Dinkes)	%	Anak Balita gizi kurang yang diberi PMT	-	-	-	-	90	Dinas Kesehat an	Dinas Kesehatan
						Pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi usia kurang dari 6 bulan (Pengampu Dinkes)	%	Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	-	-	-	-	59	Dinas Kesehat an	Dinas Kesehatan
						Pemberian MP ASI bagi Anak usia 6-23 bulan (Pengampu Dinkes)	%	Anak Usia 6-23 buln yang mendapat MP ASI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehat an	Dinas Kesehatan
						Penyusunan kebijakan penurunan gizi buruk (Pengampu DINKES)	Dokumen	Jumlah kebijakan penurunan gizi buruk yang disusun	-	-	1	1	1	Dinas Kesehat an	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pemberian PMT bagi Ibu Hamil KEK (Pengampu Dinkes)	%	Ibu Hamil KEK yang mendapatkan PMT	-	-	-	-	91	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pemberian TTD bagi ibu Hamil (Pengampu Dinkes)	%	Ibu Hamil yang mendapat TTD	-	-	-	-	91	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pemberian TTD bagi Remaja Putri (Pengampu Dinkes)	%	Remaja Putri yang mengkonsumsi TTD	-	-	-	-	50	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pemberian TTD bagi Calon Pengantin/Calon Ibu (Pengampu Dinkes)	%	Ibu Hamil yang Mendapat TTD	-	-	-	-	91	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pemeriksaan Haemoglobin pada remaja putri penderita anemia (Pengampu DINKES)	Orang	Jumlah Remaja putri penderita anemia yang diperiksa Hemoglobin	-	-	-	-	N/A	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Penyediaan bahan habis pakai (strip Hb, alcohol swab dan blood lancet) untuk skrining anemia pada remaja putri	Paket	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	-	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pemberian Bantuan Pangan untuk 210 Keluarga Beresiko Stunting (Pengampu DKPP)	Keluarga	Jumlah KK yang mendapat bantuan	-	-	-	1	1	DKPP	DKPP

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Sosialisasi Makan Benar Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) (Pengampu DKPP)	Kegiatan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan sesuai target	-	2	2	1	5	DKPP	DKPP
						Penyusunan Peta Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) (Pengampu DKPP)	Dokumen	Peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	-	-	-	1	1	DKPP	DKPP
						Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) (Pengampu DKPP)	Dokumen	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	-	-	-	1	1	DKPP	DKPP
						Distribusi keberagaman pangan pokok sesuai kebutuhan (Pengampu DKPP)	Laporan	Laporan pemantauan stok, pasokan dan Harga Pangan	3	3	3	3	12	DKPP	DKPP
						Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan kepada perwakilan ibu-ibu PKK Pokja 3 Setiap Kecamatan (Pengampu DKPP)	Kali	Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	-	1	-	1	DKPP	DKPP

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pemberian Bantuan Pangan Segar secara langsung kepada masyarakat (210 keluarga beresiko stunting) (Pengampu DKPP)	Laporan	Laporan Pemberian Bantuan Pangan untuk Keluarga Beresiko Stunting	1	1	1	1	1	DKPP	DKPP
						Pelaksanaan Operasi Pasar (Pengampu Disdagin)	Kali	Jumlah pelaksanaan pasar murah/operasi pasar	1	2	1	1	5	Disdagin	Disdagin
						Penumbuhan kelompok Buruan SAE di lokus Stunting (Pengampu DKPP).	Kelompok	Jumlah kelompok penumbuhan	50	-	30	-	80	DKPP	DKPP
						Pemberian hasil panen dari kelompok buruan SAE kepada keluarga resiko stunting, posyandu dan masyarakat sekitar (Pengampu DKPP)	Laporan	Laporan pemberian bantuan	1	1	1	1	4	DKPP	DKPP
						Pemberian Manfaat pekarangan bagi keluarga stunting (Pengampu DKPP)	%	Keluarga stunting yang mendapat manfaat pekarangan							

[illegible]

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
					Omset Usaha Keluarga Miskin dan Rentan (Pengampu Dinas Koperasi dan UKM)										
					Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat Keluarga Miskin dan Rentan (Pengampu DINSOS)		Orang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan	25	25	25	25	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
					Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Pengampu DPPKB)		Kelompok	Jumlah Kelompok UPPKA yang dibina	68	58	59	37	222	DPPKB	DPPKB
					Pemberiajn bantuan tunai bersyarat bagi PUS miskin (Pengampu Dinsos)		%	PUS Miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat (Pengampu Dinsos)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			Belum Optimalnya pelaksanaan PHBS	Meningkatnya Pelaksanaan PHBS	Jumlah Tatanan	Pemantauan 8 Tatanan tentang Kawasan Tanpa Rokok (Pengampu DINKES)	Tatanan	Jumlah tatanan yang terpantau Kawasan Tanpa Rokok	8	8	-	-	8	Dinkes	Dinkes
					Pembinaan Masyarakat tentang PHBS Tatanan Rumah Tangga (Pengampu Dinkes)		% rumah tangga sehat	Persentase rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS tatanan rumah tangga	-	-	-	68,50	68,50	Dinkes	Dinkes

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Sosialisasi Tentang Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), (Pengampu DKPP)	Kegiatan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan sesuai target	-	2	2	1	5	DKPP	DKPP, Disdik, dan Dinkes
						Pembinaan Bina Keluarga Balita (Pengampu DPPKB)	Kelompok	Terlaksananya pembinaan bina keluarga balita Kota Bandung	144	141	141	141	567	DPPKB	DPPKB
						Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (Pengampu Disdik)	PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat Pembinaan							
						Meningkatnya kualitas pangan siap saji (Pengampu DINKES)	Sarana Tempat Pegolahan Pangan	Jumlah tempat pengolahan pangan yang memenuhi syarat kesehatan	46,2	47,8	49,4	51	51	Dinkes	Dinkes
						Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Oleh Masyarakat (Gerakan Aksi Berzi, Cegah Stunting dan Aktifkan Posyandu) (Pengampu DINKES)	Kali	Telaksananya Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-	-	3	-	3	Dinkes	Dinkes, Sekolah dan Kewilayahan

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Sosialisasi dan pelatihan instruktur Senam Bandung Juara dalam rangka memnudayakakn OR Masyarakat (Pengampu Dispora)	Index. Angka Pembangun an Olah Raga aspek SDM, Partisipasi dan Kebugaran Jasmani *Pengampu Dispora)							Dispora	Dispora
						Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok (Pengampu Dinkes)	Tatanan	Jumlah tatanan KTR yang dipantau tingkat kepatuhan KTR	8	8	8	8	8	Dinkes	Tim Satgas KTR Kota Bandung, 80 Puskesmas dan 39 RS
				Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan Berkeluarga	Kehamilan Remaja	Pembinaan PIK-R dan BKR (Pengampu DPPKB)	Kegiatan	Jumlah Kelompok PIK-R dan Bina Keluarga Remaja yang dibina	103	96	106	90	399	DPPKB	DPPKB
						Kelompok PIK Remaja dan BKR yang memberikan Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi remaja baik secara online maupun offline (Pengampu DPPKB)	Kelompok	Kelompok PIK-R dan BKR yang memberikan edukasi	70	49	222	46	387	DPPKB	DPPKB

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja di kota bandung baik secara online maupun secara offline (Pengampu DPPKB)	Orang	Jumlah Remaja yang mendapat edukasi ttg Kesehatan Reproduksi	2100	2100	2100	2103	9360	DPPKB	DPPKB, PIK R Sekolah dan Masyarakat, BKR
						Penyuluhan KIE Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting melalui kegiatan Road Show Nonton Bareng Film Edukasi di sekolah-sekolah dan masyaraka	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Bergerak (Mupen)	12	12	12	12	48	DPPKB	DPPKB
						Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan/S SK (Pengampu DPPKB, Disdik)	Sekolah	Jumlah sekolah yang melaksanakan SSK	1	1	1	1	4	DPPKB	DPPKB
						Pendampingan tentang kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah bagi PUS (Pengampu DPPKB dan DINKES)	PUS	% PUS yang mendapat pendampingan	-	-	-	61,68	61,68		

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pendampingan Calon Pengantin tentang pencegahan stunting (Pengampu DPPKB)	Calon Pengantin	Calon Pengantin yang mendapat pendampingan	822	822	822	822	822	DPPKB	Tim Pendamping Keluarga
						Penyuluhan dan Pendampingan Keluarga berisiko stunting (Pengampu DPPKB)	PUS	Jumlah PUS yang mendapat pendampingan Tim Pendamping Keluarga	2800	2800	2800	2800	11200	DPPKB	DPPKB
	Penurunan Tingkat Risiko Infeksi	% Penanggulangan Pencegahan Infeksi	Masih Rendahnya kualitas Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kecamatan	Jumlah KBS baru yang terbentuk	-	-	-	-	30	DLH	DLH, Kecamatan, Kelurahan
						Monev KK yang mendapat Pemicuan Pilar 1 STBM	Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang mengakses Jamban Sehat	581.198	581.198	581.198	581.198	581.198	DINKES	DINKES dan Puskesmas
						Monev Kelurahan yang melaksanakan stop BABS/ Open Defecation Free (ODF)	Kelurahan	151 kelurahan melaksanakan stop BABS	100	100	100	100	100	DINKES	DINKES dan Puskesmas

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga/ pemeriksaan laboratorium kualitas air minum	KK	Cakupan KK yang megakses Air Miinum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	90,13	92	93	95	95	DINKES	DINKES dan Puskesmas
						Sosialisasi dan Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Setempat	Sambungan Rumah	Jumlah Sambungan Rumah	35 SR	35 SR	15 SR	10 SR	95 SR	DPKP	DPKP
						Visitasi Tempat Pengolahan Pangan dengan melakukan pemeriksaan fisik lingkungan dan pemeriksaan sampel makanan secara mikrobiologi	Sarana Tempat Pegolahan Pangan	Jumlah tempat pengolahan pangan yang memenuhi syarat kesehatan	46,2	47,8	49,4	51	51	Dinkes	Puskesmas
						Pemicuan STBM, Monev STBM dalam rangka Akses Sanitasi dasar yang layak dan aman (Pengampu DINKES)	Kelurahan	Jumlah KK yang mengakses Jamban Sehat di wilayah	151	151	151	151	151	Dinkes	Dinkes dan Puskesmas

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga/ pemeriksaan laboratorium kualitas air minum (Pengampu DINKES)	KK	Jumlah KK yang megakses Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	90,13	92	93	95	95	Dinkes	Dinkes dan Puskesmas
						Perbaikan Rumah tidak layakhuni (Pengampu DPKP)	KK	Jumlah KK MBR yang menempati hunian layak	0	593	292	0	885	DPKP	DPKP
						Pemantauan jentik di rumah/ bangunan yang ada di lingkungan masyarakat	%	Angka Bebas Jentik minimal 90 %	90	90	90	90	90	Dinkes	UPTD Puskesmas, kader Jumanik, dan masyarakat
						Sosialisasi dan Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah	Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum	600 SR	600 SR	11200 SR		2320 SR	DPKP	DPKP
						Inspeksi dan Visitasi Tempat Fasilitas Umum dengan melakukan pemeriksaan fisik lingkungan (Pengampu DINKES)	sarana TFU	Jumlah tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan	68,6	72	74	80	80	Dinkes	Puskesmas

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/kota	%	Indeks So2, Presentase Hidup Sungai dengan Status Indeks Pencemaran Ringan	10	10	10	10	10	DLH	DLH
						diseminasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja (materi fasilitasi pekerja diperusahaan untuk pekerja perempuan)	Kegiatan	Pelaksanaan Deseminasi	-	-	100	-	100	Disnaker	Disnaker
						Palayanan Kesehatan bagi ibu hamil sesuai standar (Pengampu Dinkes)	orang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9300	18690	28035	37379	37379	Dinkes	Dinkes
						Palayanan Kesehatan bagi ibu bersalin sesuai standar (Pengampu Dinkes)	orang	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8625	17252	25879	35404	35404	Dinkes	Dinkes
						Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin / PUS sesuai standar (Pengampu DINKES)	%	Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin yang terdaftar di lembaga keagamaan	-	-	-	-	-	Dinkes	Dinkes

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu (pengampu DINKES)	%	Capaian SDIDTK balita	-	-	-	-	80	Dinkes	Dinkes
						Pemeriksaan Haemoglobin pada remaja putri penderita anemia (Pengampu DINKES)	Orang	Remaja putri kelas VII dan X yang dilakukan pemeriksaan Hemoglobin	-	-	-	-	70	Dinkes	Dinkes
						Pemberian pelayanan kasus TBC pada Balita terstandar di Puskesmas	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan terhadap kasus TB pada Balita sesuai standard	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes
						Pemberian Imunisasi bagi Balita (Pengampu Dinkes)	%	Universal Child Immunization	25	25	25	25	100	Dinkes	Dinkes
						Pelayanan Kasus Diare pada Balita terstandar	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan terhadap kasus Diare Pada Balita sesuai standard	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes
						Pelayanan Kasus ISPA pada Balita terstandar	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan terhadap kasus ISPA pada Balita sesuai standard	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pelayanan pencegahan Kasus Kecacingan terstandar	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan pencegahan kasus kecacingan pada balita sesuai standar	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes
						Pelayanan Kasus TBC Pada Ibu Hamil terstandar	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan pencegahan kasus TBC pada Ibu Hamil sesuai standar	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes
						Pelayanan kasus hipertensi pada Ibu hamil sesuai standar	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kasus Hipertensi sesuai standar, termasuk pada Ibu hamil.	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes
						Pelayanan deteksi dini dan penanganan gangguan mental pada Ibu hamil	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan deteksi dini dan penanganan gangguan mental sesuai standar, termasuk pada Ibu hamil.	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pembinaan Faskes dalam Pelayanan KIA terstandar (Pengampu DINKES)	Faskes	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan KIA	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes
						Pembinaan Faskes yang memberikan penanganan Penyakit agar sesuai standar (Pengampu DINKES)	Faskes	Jumlah Faskes yang memberikan penanganan Penyakit agar sesuai standar	80	80	80	80	80	Dinkes	Dinkes
						Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar bagi Bayi baru lahir (Pengampu DINKES)	Orang	Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8028	16055	24085	32114	32114	Dinkes	Dinkes
						Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar Bagi Balita (Pengampu DINKES)	Orang	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23280	46565	69843	93124	93124	DINKES	DINKES
						Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ibu hamil (Pengampu DINKES)	Orang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9300	18690	28035	37379	37379	DINKES	DINKES

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ibu bersalin (Pengampu DINKES)	Orang	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standa	862 5	17252	25879	35404	35404	DINKES	DINKES
						Terbinanya Faskes tentang pelayanan kesehatan keluarga terpadu (Pengampu DINKES)	Faskes	Jumlah Pembinaan Faskes tentang Pelayanan Kesehatan Keluarga terpadu	80	80	80	80	80	DINKES	DINKES
						Pembinaan Puskesmas untuk meningkatkan penanganan penyakit berdampak pada stunting (Diare & TB) sesuai standar (Pengampu DINKES)	Faskes	Jumlah Faskes yang memberikan penanganan Penyakit agar sesuai standar	80	80	80	80	80	DINKES	DINKES
						Pembinaan Faskes dalam memberikan pelayanan KB sesuai standar (Pengampu DPPKB)	Faskes	Jumlah Faskes yang mendapat pembinaan	25	25	25	28	103	DPPKB	DPPKB
						Pemenuhan Tenaga Gizi yang kompeten di setiap Faskes (Pengampu BKPSDM, Dinkes)	Faskes	Jumlah Faskes dengan minimal 1 orang tenaga nutrisisionis	80	80	80	80	80	DINKES	DINKES

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pelatihan tim tatalaksana gizi Faskes	Faskes	Jumlah Faskes dengan Tim terlatih tatalaksana gizi buruk	-	-	-	-	16	DINKES	DINKES
						Pembinaan Tenaga Kesehatan Pemberi Pelayanan Gizi (Pengampu DINKES)	Orang	Jumlah tenaga kesehatan pemberi pelayanan gizi yang dibina	80	80	80	80	80	DINKES	DINKES
						Sosialisasi dan pembinaan Faskes tentang pelayanan KB	Faskes	Faskes yang memberikan pelayanan KB	187	187	187	187	187	DPPKB	DPPKB
						Penyediaan Alokon di Fasilitas Kesehatan	Persen	Cakupan Faskes yang mendapat perwediaan alokon sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100		
						Penggerakan edukasi dan fasilitasi terkait kesertaan akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Pengampu DPPKB)	PUS	Akseptor yang menggunakan KB MKJP	35,5 0	35,70	35,90	36	36	DPPKB	DPPKB
						Fasilitasi Pelayanan PUS untuk ber KB (Pengampu DPPKB)	PUS	Jumlah Pus yang dilayani	46.8 65	46.86 5	46.86 5	46.86 5	46.86 5	DPPKB	DPPKB

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Pendaftaran Masyarakat Miskin yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan menjadi peserta JKN (BPJS PD PEMDA) (Pengampu Dinkes)	Persen	Cakupan Masyarakat Miskin yang terlayani kesehatannya	100	100	100	100	100	DINKES	DINKES
						PUS miskin penerima bantuan PBI (Pengampu Dinkes)	Persen	PUS miskin penerima bantuan iuran PBI							
						Terselenggaranya pendampingan sosial bagi keluarga miskin dan rentan (Pengampu : DINSOS)	Persen	Cakupan keluarga miskin dan rentan yang memperoleh pendampingan sosial	100	100	100	100	100	DINSOS	DINSOS
						Pengelolaan Jaminan Pelayanan kesehatan Masyarakat (Pengampi DINKES)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3	3	3	3	12	DINKES	DINKES
						Terselenggaranya Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan melalui berbagai media seperti tatap muka ke kewilayahan, melalui media elektronik, media cetak, maupun media sosial.	Dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi	3	3	3	3	12	DISDUKC APIL	DISDUKCAPIL

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						(Pengampu : Disdukcapil)									
						Terselenggaranya Pelayanan adminduk dengan metode jemput bola melalui program Mepeling dan Bi Eha dan Mang Udin. (Pengampu : Disdukcapil)	Persen	Cakupan Kepemilikan KTP-elektronik	96	97	98	99,40	99,40	DISDUKC APIL	DISDUKCAPIL
						Terselenggaranya Pelayanan adminduk dengan metode jemput bola melalui program Mepeling dan KISANAK (Pengampu : Disdukcapil)	Persen	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	43	45	47	50	50	DISDUKC APIL	DISDUKCAPIL
						Terselenggaranya Pelayanan adminduk dengan metode jemput bola melalui program Mepeling Akta Kelahiran dan Kerjasama dengan IBI dan Rumah Sakit (Pengampu : Disdukcapil)	Persen	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 17 tahun	92	94	96	98	98	DISDUKC APIL	DISDUKCAPIL

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Terselenggaranya Kegiatan Pencatatan Perkawinan Massal bagi Penduduk Non Muslim bekerjasama dengan FOKTI MP (Pengampu : Disdukcapil)	Laporan	Jumlah Laporan Pencatatan Perkawinan	-	1	-	1	2	DISDUKC APIL	DISDUKCAPIL
						Pendataan Keluarga (Pengampu DPPKB)	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pendataan Keluarga	1	1	1	1	1	DPPKB	DPPKB
	Pemanfaatan Aplikasi Stunting yang terintegrasi (E-Penting)	% Stakholder yang memanfaatkan E-Penting	Rendahnya Kualitas Database	Meningkatnya kualitas database terkait stunting (ANSIT) berdasarkan PERPRES 72 tahun 2021 (dalam kurung 29 indikator) melalui aplikasi E Penting	% Akurasi Data Stunting	Tersedianya SDM Pengelola atau Pengguna Data Terkait Stunting Berdasarkan Kelompok Sasaran (Pengampu TPPS)	%	SDM Pengelola Data sesuai kelompok Sasaran yang memiliki pemahaman kategori baik	-	-	1	-	1		
						Terlaksananya pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data pada Puskesmas (Pengampu TPPS)	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data pada Puskesmas	-	-	1	-	1		
						Terlaksananya pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data pada Kelurahan	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data pada Kelurahan	-	-	1	-	1		

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Terlaksananya Pelatihan SDM Pengelola Data Melalui Aplikasi E-Penting terintegrasi berdasarkan kelompok sasaran (Pengampu TPPS)	unit	Jumlah pelatihan pengelolaan data melalui Aplikasi e-Penting	6	8	6	10	30		
						Tersedianya Data Terkait Stunting Yang akurat (Pengampu TPPS)	%	Data terkait stunting yang lengkap dan akurat (29 Indikator)							
						Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan Data Terkait Stunting yang bersumber dari beberapa Aplikasi yang tersedia (Pengampu TPPS)	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan kebutuhan Data (29 Indikator) terkait stunting dari beberapa sumber data yang tersedia (aplikasi/Bukan Aplikasi)	1	-	1	-	2		
						Terlaksananya Pengumpulan Data Terkait Stunting Melalui Aplikasi E-Penting Terintegrasi (Pengampu TPPS)	Laporan	Jumlah laporan Pengumpulan Data Terkait Stunting melalui Aplikasi e-Penting Terintegrasi	4	4	4	4	16		
						Tersedianya Laporan Monev Data secara berkala (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Laporan Monev Data berdasrkan Kelompok Sasaran	4	4	4	4	16		

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Terlaksananya Monitoring dan evaluasi progres input data berdasarkan kelompok sasaran (TPPS)	Laporan	Laporan Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Progres Input Data berdasarkan Kelompok Sasaran per minggu	4	4	4	4	16		
						Terlaksananya koordinasi Monitoring dan evaluasi Progres Input Data Lintas Sektor (kelompok sasaran) (Pengampu TPPS)	Laporan	Laporan Jumlah Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progres Input Data Lintas Sektor (Kelompok Sasaran)	4	4	4	4	16		
						Terlaksananya Pemutakhiran/ input data terkait stunting perharari/bulan/tahun (kelompok sasaran) (Pengampu TPPS)	Laporan	Laporan Jumlah Pemutakhiran/ Input Data terkait Stunting per Hari/Bulan/Tahun (Kelompok Sasaran)	4	4	4	4	16		
			Belum Optimalnya Aksesibilitas Aplikasi E-Penting terintegrasi	Meningkatnya Aksesibilitas Aplikasi E-penting Terintegrasi	% Pemanfaatan Sistem Informasi Penanganan stunting	Tersedianya SDM Pengelola Aplikasi E-Penting (Pengampu TPPS)	%	% Ketersediaan SDM pengelola Aplikasi e-Penting	-	-	-	-	-		
						Tersedianya Pemetaan Pengguna Aplikasi E-Penting (Pengampu TPPS)	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan Pengguna aplikasi e-penting	-	-	-	-	-		

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Terlaksananya Koordinasi antara pihak pengguna Aplikasi E-Penting (Pengampu TPPS)	Laporan	Laporan Kegiatan Koordinasi sesama pengguna aplikasi	-	-	-	-	-		
						Tersedianya Akses internet yang mudah (Pengampu DISKOMINFO)	%	Ketersediaan Akses Internet yang Mudah	30	35	35	-	100		
						Terlaksananya Survey Pemetaan Blank Spot Internet (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Laporan Hasil Survey Pemetaan Blank Spot Internet	-	-	-	1	1		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung internet	Laporan	Laporan Ketersedian Sarana dan Prasarana Pendukung Interne	-	-	-	1	1		
						Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progres Input Data Lintas Sektor (Kelompok Sasaran)	Kegiatan	Laporan Jumlah Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progres Input Data Lintas Sektor (Kelompok Sasaran)	4	4	4	4	16		
						Tersedianya panduan/informasi penggunaan aplikasi E-Penting (Pengampu DISKOMINFO)	%	% Ketersediaan Panduan/Informasi Penggunaan Aplikasi e-Penting	1	3	1	-	5		

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Tersusnya Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Penting (Pengampu DISKOMINFO)	Kegiatan	Laporan Kegiatan Penyusunan Pedoman Penggunaan Aplikasi e-Penting							
						Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Penting (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Penting	6	8	8	8	30		
			Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Pendukung E Penting	Meningkatnya Kualitas Infakstruktur Pendukung Aplikasi E-Penting	% SDM Kompeten Pengelola database dan sistem informasi stunting	Tersedianya SDM IT yang memiliki sertifikast kompetensi (Pengampu DISKOMINFO)	orang	% Ketersediaan SDM IT yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	1	2	3	-	6		
						Terlaksananya Indentifikasi Kebutuhan SDM IT (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Laporan Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan SDM IT	-	1	-	-	1		
						Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan IT (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan IT	-	-	1	-	1		
						Terlaksananya Uji Kompetensi (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi	-	-	-	1	1		

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Tersedianya Perangkat Pendukung Aplikasi E-Penting yang Berkualitas (Pengampu DISKOMINFO)	%	% Ketersediaan Perangkat Pendukung Aplikasi e-Penting yang Berkualitas	-	-	-	1	1		
						Terlaksananya Pemetaan Perangkat Pendukung (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Pemetaan Perangkat Pendukung	-	-	-	1	1		
						Terlaksananya Pengadaan Perangkat Pendukung (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pendukung	-	-	-	1	1		
						Tersedianya Aplikasi E-Penting yang aman (Pengampu DISKOMINFO)	%	% Ketersediaan Aplikasi e-Penting yang Aman	-	-	-	1	1		
						Terlaksananya Uji Ketahanan Aplikasi E-Penting (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Penetrasi Testing) (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Ketahanan Aplikasi e-Penting (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Penetrasi Testing)	-	-	-	1	1		

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Terlaksananya Mitigasi Risiko Aplikasi E-Penting (Pengampu DISKOMINFO)	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Mitigasi Risiko Aplikasi e-Penting	-	-	-	1	1		
RB Tematik P3DN Target Tahun 2023 : 35% Sasaran : Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator : Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri															
	Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Baik	Indeks Tata Kelola Pengadaa n Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE	Mengumumkan Seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai pagu Pengadaan pada SiRUP	Persen	Persentase Paket Pekerjaan yang diumumkan RUPnya melalui SiRUP	100	-	-	-	100	Bagian PBJ	Seluruh PD
						Melaksanakan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem pada Aplikasi P3DN SIPD	Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan	-	-	1	1	2	Bagian PBJ	Seluruh PD
						Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi realisasi TKDN/PDN	Persen	Persentase realisasi TKDN/PDN						Bagian PBJ	Seluruh PD
						Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket e-	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket e-	60	60	60	60	240	Bagian PBJ	Seluruh PD

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e-Tendering		Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e-Tendering							
						Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik	60	60	60	60	240	Bagian PBJ	Seluruh PD
						Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE	-	-	60	60	120	Bagian PBJ	Seluruh PD
						Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE	60	60	60	60	240	Bagian PBJ	Seluruh PD
						Melaksanakan Evaluasi Kepatuhan PD dalam Pencatatan Seluruh Paket Pekerjaan pada SPS	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi Kepatuhan PD dalam Pencatatan Seluruh Paket Pekerjaan pada SPS	-	-	60	60	120	Inspektorat	Seluruh PD
		Presentase peningkatan pelaku usaha	Proses sertifikasi yang sulit	Terwujudnya iklim perijinan pelaku usaha	Sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil	Melaksanakan proses sertifikasi TKDN bagi	Kegiatan	Jumlah Sertifikasi Pelaku Usaha	14	13	18	15		Disdagin	Disdagin

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
		yang terdaftar di katalog lokal		lokal yang mudah dan ramah pelaku usaha	sesuai SLA 14 hari kerja	Pelaku Usaha Industri Kecil lokal sesuai SLA 14 hari kerja		Industri Kecil yang tersertifikasi TKDN							
			Regulasi daerah yang tidak mendukung		Sertifikasi TKDN bagi Industri Menengah sesuai SLA 45 hari kerja	Melaksanakan proses sertifikasi TKDN bagi Pelaku Usaha Industri Menengah lokal sesuai SLA 45 hari kerja	Kegiatan	Jumlah Sertifikasi Pelaku Usaha Industri Menengah yang tersertifikasi TKDN	-	-	10	10	20	Disdagin	Disdagin
			Pelaku Usaha yang Belum Memahami terkait Proses Pengadaan secara Elektronik	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait Proses Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang paham dengan proses pengadaan secara elektronik	Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha dan UMKM lokal terkait Proses Pengadaan Secara Elektronik	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha dan UMKM lokal terkait Proses Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	100	100	BPBJ, DiskopUK M,dan Disdagin	Pelaku Usaha
			Pelaku Pengadaan belum mencantumkan TKDN dalam dokumen kontrak	Meningkatnya pencantuman TKDN dalam dokumen kontrak oleh Pelaku Pengadaan	Jumlah kontrak yang mencantumkan TKDN	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pencantuman TKDN dalam Kontrak dengan Pelaku Pengadaan	Pelaku Pengadaan	Jumlah Pelaku Pengadaan yang mengikuti sosialisasi kebijakan Pencantuman TKDN dalam Kontrak	-	-	200	-	200	BPBJ	Pelaku Pengadaan
	Meningkatnya realisasi RUP PDN	% capaian RUP PDN	Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia	Meningkatnya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan	% barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi	Melaksanakan business matching antara DISDAGIN, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia)	Pelaku Pengadaan	Jumlah Pelaku Pengadaan yang mengikuti business matching	-	-	-	50	50	Disdagin	Seluruh Perangkat Daerah

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
			Belum adanya kebijakan pemberian preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase	Persentase preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan	1,9%	32,1%	62,3%	3,7%		BPBJ	Pelaku Pengadaan
			Belum adanya informasi transaksi penggunaan e-katalog secara komprehensif			Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif atau tidak, bagaimana ratingnya, dll)	Laporan	Laporan hasil Monev e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif atau tidak, bagaimana ratingnya, dll)	-	-	-	1	1	BPBJ	Pelaku Pengadaan
			Belum optimalnya pelaksanaan penilaian penyedia oleh			Melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian penyedia oleh	Laporan	Laporan monitoring dan evaluasi penilaian penyedia oleh	-	-	-	1	1	BPBJ	Pelaku Pengadaan

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
			pengguna e-katalog			penggunaan e-katalog		penggunaan e-katalog							
			Spesifikasi barang yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh penyedia dalam negeri	Menurunnya Belanja Produk Impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	% Belanja Produk Impor pada RUP terpenuhi	Menyusun Kebijakan Pengendalian Penggunaan Produk Impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Regulasi	Jumlah Kebijakan Pengendalian Penggunaan Produk Impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan	1	-	-	-	1	Sekretariat Tim P3DN	Seluruh Perangkat Daerah
			Masih rendahnya kepatuhan melaksanakan RUP sesuai pencatatan	Meningkatnya Kepatuhan dalam Penggunaan PDN/UMKM	Persentase Tindaklanjutan Kebijakan Penggunaan PDN/UMKM	Melaksanakan revisi pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Bandung	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Perbaikan Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Bandung	1	-	-	-	1	Sekretariat Tim P3DN	Seluruh Perangkat Daerah
						Melaksanakan Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Paket Pekerjaan	Jumlah Paket Pekerjaan yang dilakukan Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	15	-	120	120	255	Inspektoral	Seluruh Perangkat Daerah

No	Sasaran Tematik	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Perangkat Daerah (PD)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Leading Sector	Pelaksana
						Melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan kepatuhan Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Paket Pekerjaan	Jumlah Paket Pekerjaan yang ditindaklanjuti rekomendasinya atas hasil Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		15		120	135	Inspektoral	Seluruh Perangkat Daerah

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002